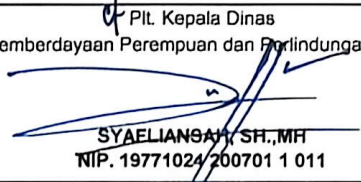


 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Halaman	1 dan 2
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  SYAELIANGAH, SH., MH NIP. 19771024 200701 1 011
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nama SOP	Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
SOP Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang 1. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 3. Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2024 tentang RENCANA AKSI 4. DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024 - 2026	1. Memahami kebijakan PUG, perencanaan pembangunan daerah, serta mekanisme penganggaran. 2. Bertugas mengoordinasikan pelaksanaan PUG & PPRG lintas OPD. 3. Telah mengikuti pelatihan PPRG ataupun Pendampingan Penyusunan Dokumen GAP & GBS. 4. Mampu menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi. 5. kompeten, sah secara administratif, terlatih, dan mampu berkoordinasi lintas sektor agar PUG dan PPRG benar-benar	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. Surat Edaran Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2. Instrumen pengumpulan data terpilah gender Evaluasi Mandiri tentang capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Aplikasi Penilaian 3. Penganugerah Parahita Ekapraya (PPE) oleh Kementerian PPPA	Panduan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 1. (PPRG) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Dokumen Gender Analysis Pathway (GAP). 3. Dokumen Gender Budget Statement (GBS). 4. Perlengkapan Komputer	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka 1. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Responsif Gender (PPRG) ini tidak akan berjalan lancar	Laporan data terpilah. 1. Dokumen GAP dan GBS yang lengkap. Rekapitulasi kegiatan responsif gender per tahun anggaran.	

SOP Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Responsif Gender (PPRG)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bidang PUGP3SDGA	TIM Analisi Gender	Seluruh OPD/Stakeholder	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pendampingan pengisian lembar kerja Gender Budget Statement (GBS) ke instansi				Dokumen	120 Menit	Advokasi dan Sosialisasi	
2	Memeriksa dokumen perencanaan daerah menggunakan alat analisis gender (Gender Analysis Pathway).				Dokumen	60 menit	Analisis Gender	
3	Mengumpulkan, memvalidasi, dan mengolah data terpilah menurut jenis kelamin untuk dasar pengambilan kebijakan				Dokumen	600 menit	Verifikasi Data Pilah	
4	Mengoordinasikan pertemuan berkala Kelompok Kerja (Pokja) PUG tingkat daerah				Dokumen	60 menit	Fasilitasi Pokja PUG	

Plt. Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak



SYAFLIANSAH, SH.,MH
NIP. 19771024 200701 1 011